

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akbar, Patrialis. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Ash-Shiddiqie, Jimly. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Ash-Shiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ash-Shiddiqie, Jimly. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers. 2023.
- Gaffar, Janedri M. *Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Huda, Ni'matul. *Lembaga Negara Masa Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press. 2017.
- Indra, Muhammad Ridwan. *Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Dan Hak Menguji Menurut UUD 1945*. Bandung: Sinar Grafika. 1987.
- Indrayana, Denny. *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*. Bandung: Mizan. 2007.
- Indrayana, Denny. *Amandemen Uud 1945: Antara Mitos Dan Pembongkaran*. Bandung: Mizan. 2007.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2010.
- Laporan Dewan Pertimbangan Agung RI Periode 1998-2003.
- Locke, John. *Two Treaties of Government*. London: Rod Hay for the McMaster University Archive of the History of Economic Thought. 1960.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Mas, Marwan. *Hukum Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*. Depok: Rajawali Pers. 2019.
- Maulana, Adi. *Ilmu Negara*. Surabaya: Penerbit Erlangga. 2014.

- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2017.
- Munaf, Yusri. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Riau: Marpoyan Tujuh Publishing. 2014.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo. 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjomomor *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemantri, Taufik Sri. *Lembaga Negara Dan State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut Uud 1945*. Jakarta: Direktorat Penelitian Dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. 2011.
- Soemardjono, Maria S.W. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 2014.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Grafindo. 2022.
- Torrance, David. *The Privy Council: History, Functions, And Membership*. House Of Commons Libary. Research Briefing.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.

Tesis

- Agus Wanti Lahamid, “Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia: Analisis Yuridis Kewenangan Dan Fungsi Dewan Pertimbangan (Presiden) Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945”, Tesis, Repositori Universitas Indonesia, Tahun 2007.
- Arifin, Syamsul. "Analisis Yuridis Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". Tesis. Repositori Universitas Medan Area. 2012.

- Daniel Stefanus Sinaga, Kedudukan dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disertasi. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2019.
- Diva Febrina Nurcahyani Rahman, “Peran dan Kedudukan Staf Khusus Presiden dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan”, Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Helda, “Analisis Yuridis Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Tesis, Repositori Universitas Medan Area, 2012.
- Lahamid, Agus Wanti. “Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia: Analisis Yuridis Kewenangan Dan Fungsi Dewan Pertimbangan (Presiden) Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945”. Tesis. Repositori Universitas Indonesia. Tahun 2007.
- Nanda Khalimatus Sa'diyah, “Urgensi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia sebagai Lembaga Penasihat Presiden”, Disertasi, Universitas Pancasakti Tegal, 2025.
- Raden Dafa Putra Pradana, “Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, Disertasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2025.
- Syamsul Arifin, "Analisis Yuridis Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", Tesis, Repositori Universitas Medan Area, 2012.
- Yusri Wahyuni, “Urgensi lembaga Dewan Pertimbangan Presiden dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

Karya Ilmiah

- Abu Thamrin, “Perubahan Konstitusi dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Cita Hukum, Vol. II, Nomor 1, Juni 2015.
- Adam Setiawan, “Problematik Penataan Kelembagaan Negara”, Kompas.com, Diakses 28 Desember 2024.
- Adif Rachmat Nugraha, “Memperkuat Presidensialisme: Redesain Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia Berdasarkan Kerangka Center of Government”, Prosiding Konferensi Nasional Politeknik STIA LAN Bandung, 2024.
- Alamsyah, Syauiid dan Nurdin. “Lembaga Representatif Publik: Relasi Kekuasaan Dalam Perspektif Perbandingan Sistem Presidensial vs Sitem Parlementer

- (Studi Kasus Indonesia Dengan Inggris)". *Jurnal Adhikari*. Vol. 2, Nomor3. 2023.
- Annisa Febiola, "8 Poin Revisi Uu Wantimpres: Salah Satunya Jumlah Anggota Tergantung Presiden", *Tempo.Co*, <https://Nasional.Tempo.Co/Read/1918616/8-Poin-Revisi-Uu-Wantimpres-Salah-Satunya-Jumlah-Anggota-Tergantung-Presiden>.
- Ari Wuisang dan Roby Satya Nugraha, "Status Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD Tahun 1945", *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 9, No. 3, 2023.
- As'ad Syukri, "Pasang Surut Lembaga DPA", *Jurnal Al-Qalam*, Nomor 58/XI/1996.
- Asri Gustiwi, "Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia", *Jurnal Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol.8, No.1.
- Asrinaldi, "Koalisi Model Parlemeter dan Dampaknya pada Penguatan Kelembagaan Sistem Presidensial di Indonesia", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.10, No.2, 2013.
- Brilliant Bintang Prasetya, dan Ryan Muthiara Wasti, "Dewan Pertimbangan Presiden dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol.52, No. 3, 2022.
- Dahimatul Afidah, "Meninjau Perjalanan Perumusan Dasar Negara hingga Penetapan Dekrit Presiden 1959." *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* Vol.7, No.1, 2023.
- Damanik, Reza Sukma. "Analisis Studi Komparasi Terhadap Kedudukan Dan Fungsi Wantimpres Ri Dengan Conseil D'etat Prancis". *Jurnal Jimawa*. Vol.1, Nomor2. 2021.
- Dewi Krisna, "Mengkaji Ulang Pembatasan Kekuasaan Presiden Dan Penguatan Kekuasaan DPR dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Diversi: Jurnal Hukum*, Vol.8, No.2, 2022.
- Fajar R.D Miarsa, M. Zamroni, Ahmad H. Romadhon, Cholila A. Hazir. "Contempt Of Court Dalam Pelaksanaan Putusan Ptun: Suatu Perbandingan Indonesia Dan Prancis". *Journal Of Judicial Review*. Vol. 23, Nomor1, 2021.
- Fitri, Sesi Deska dan Bustanuddin, "Analisis Dewan Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No.2, 2021.
- Gladys Chyntia Malo, Saryono Yohanes, dan Cyrilius W.T. Lamataro, "Kedudukan dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Petition Law Journal*, Vol 2, No.2, 2025.

- Hardjanti, Dewi Krisna. "Mengkaji Ulang Pembatasan Kekuasaan Presiden dan Penguatan Kekuasaan DPR dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Diversi: Jurnal Hukum* Vol.8, No.2, 2022.
- Hoxie, R. Gordon. "The National Security Council." *Presidential Studies Quarterly*, Vol.12, No.1, 1982.
- Ilham Dwi Rafiqi, "Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia dan Rusia", *Jurnal Widya Yuridika*, Vol. 5, No. 1, 2022.
- Irma Idris, Gusnaeni Bachtiar, dan Wiranti, "Problematika Penghapusan Batasan Jumlah Anggota Wantimpres Indonesia", *Constitution Journal*, Vol.4, No.1, 2025.
- Iswandi, Kelik, dan Nanik Prasetyoningsih, "Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Kristiawan Putra Nugraha, "Meneropong Perdebatan UU Wantimpres: Menimbang Efektivitas dan Optimalisasi Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia", *Jurnal APHTN-JAN* Vol.2, No.8, 2024.
- Lederman, Gordon. "National Security Reform for The Twenty-First Century: A New National Security Act and Reflections on Legislation's Role in Organizational Change." *J. Nat'l Sec. L. & Pol'y* , 2009.
- Locke, John. *Two Treaties Of Government*, (London: Rod Hay For The Mcmaster University Archive Of The History Of Economic Thought), 1960.
- M. Deliyanto, "Pergeseran Kekuasaan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik dan Hukum." *Syntax Idea*, Vol.7, No.6, 2025.
- Maulia, Siti Tiara dan Witra Rahmadani, "Hierarki Lembaga Negara di Indonesia", *Jurnal Causa* Vol. 4, Nomor 9, 2024.
- Maulida, Anisa Syifa dan Diva Deda Sepkamala, Safdha Herayani, dan Wilda Haifa Ikrima. "Analisis Perbandingan Administrasi Publik Negara Inggris Dan Australia". *Jurnal Pentahelix*. Vol. 1, Nomor2. 2023.
- Milla Olkkonen, "The Role of the Security Council of the Russian Federation: a Power Tool in Russia's Strategic Decision-Making?" *National Defence University Department of Warfare Serie*, Vol. 3, No. 38, 2024.
- Mirza Nasution, "Mempertegas Sistem Presidensial", *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, 2009.
- Mochammad Faishol, "Kedudukan dan Kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden dalam Tinjauan Fiqh Siyasah." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 22, No.2, 2019.

- Muhammad Amin, "Tinjauan Yuridis tentang Kewenangan Presiden dalam Membentuk Unit Kerja Presiden berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol.1, No.3, 2021.
- Nasution, Mirza. "Mempertegas Sistem Presidensial", *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, 2009.
- Nitaria Angkasa dan Tria Noviantika, "Kedudukan Wakil Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden", *Muhamadiyah Law Review* Vol. 2, No. 2, Juli 2018, Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung.
- Nurjannah, "Peran dan Kedudukan Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia." *Media of Law and Sharia*, Vol.3, No.3, 2022.
- Oleg A. Kozhevnikov, Andrey V. Bezrukov, Aleksander N. Meshcheryakov, "Constitutional Status of The Russian State Council in The Mirror of Actual Constitutional Reforms", *Law Enforcement Review*, Vol. 5, No. 3, 2021.
- Pratondo Ario Sudiro dan Aslama Nanda Rizal, "Upaya Menghidupkan Kembali Dewan Pertimbangan Agung Ditinjau dari Sisi Teknokratik dan Historis", *Jurnal Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, Vol. 3, Nomor 2, 2024.
- Prayudi dan Uilly Ngesti Pratiwi, "Wacana Kembalinya Dewan Pertimbangan Agung dalam RUU Wantimpres", *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI*, Vol. XXI, No. 15/I/Pusaka/Agustus/2024.
- Rabkin, Jeremy. "At the President's Side: The Role of the White House Counsel in Constitutional Policy." *Law & Contemp. Probs*, No. 56, 993.
- Rizal, Nanda. "Upaya Menghidupkan Kembali Dewan Pertimbangan Agung Ditinjau Dari Sisi Teknokratik Dan Historis". *Jurnal Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*. Vol. 3, Nomor 2. Tahun 2024.
- Ryan Muthiara Wasti, "Dewan Pertimbangan Presiden dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 3, 2022.
- Secondat, Charles De and Baron De Montesquieu (Translated By Thomas Nugent), *The Spirit Of Laws*, (Canada: Batoche Books), 1752.
- Sofian, M., Azhari, A. F., dan Harun, H., "Revitalisasi Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Negara sebagai Peradilan Tata Usaha Negara Tertinggi di Indonesia (Studi Komparasi Dewan Pertimbangan Presiden Negara Prancis)," *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol.5, No.2, 2023.

- Sudiro, Pratondo Ario Seno dan Aslama Nanda Rizal. "Upaya Menghidupkan Kembali Dewan Pertimbangan Agung Ditinjau Dari Sisi Teknokratik Dan Historis". *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*. Vol. 3. Nomor 2. 2024.
- Syukri, As'ad. "Pasang Surut Lembaga DPA". *Jurnal Al-Qalam*, Nomor 58/Xi/1996.
- Thamrin, Abu. "Perubahan Konstitusi Dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Cita Hukum*. Vol. II, Nomor 1. 2015.
- The State Council of Rusia, <http://en.kremlin.ru/structure/state-council>, diakses 29 Juni 2025.
- Utang Rosidin, "Lembaga Penasehat Presiden Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Majelis: MPR-RI*, Edisi 07 Juli 2018.
- Vile, M.J.C. *Constitutionalism and the Separation of Powers: Second Edition*, (Indianapolis: Online Library of Liberty), 1998.
- Wasti, Ryan Muthiara. "Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia" *Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia*. Vol. 52, Nomor 3, Article 8. 2022.
- Windy Rizky Putri, "Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Wantimpres", *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 3 No. 2.
- Yeni Handayani, "Ada Apa Dengan Dewan Pertimbangan Presiden?", *Rechtsvinding Online*, 2015.
- Yokotani, "Sistem Bikameral di Lembaga Legislatif Berdasarkan Tugas dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (Perbandingan dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Argentina)", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. XI, Nomor 1, 2017.
- Yudi Harimurti, "Analisis Kritis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*", Vol. 27, No. 1, 2014.
- Zulfikar Ghazali, "DPA dalam Sejarah Konstitusi Republik." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 1986.

Internet

- Annisa Febiola, "8 Poin Revisi UU Wantimpres: Salah Satunya Jumlah Anggota Tergantung Presiden", *Tempo.co*, <https://nasional.tempo.co/read/1918616/8-poin-revisi-uu-wantimpres-salah-satunya-jumlah-anggota-tergantung-presiden>, diakses pada tanggal 7 Januari 2025.

Article 90 of Constitution of The Republic Of Korea, https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=1, Diakses 03 Juli 2025.

Article II, Section 2 of the Constitution of the United States, America's Founding Documents, <https://www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcript>, Diakses 29 Mei 2025.

Constitution of the Republic of Korea, National Legislative Bodies / National Authorities, <https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1948/en/19949>, Diakses 28 Juni 2025.

Council of State of Philippines, [https://dbpedia.org/page/council_of_state_\(philippines\)](https://dbpedia.org/page/council_of_state_(philippines)), Diakses 18 Mei 2025.

Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, <https://wantimpres.go.id/id/tugas-dan-fungsi/>, Diakses 29 Juni 2025.

E-media DPR RI, "Revisi UU Wantimpres Resmi Jadi UU, Rekam Jejak Hukum Anggota Wantimpres Harus Bersih", <https://Emedia.Dpr.Go.Id/2024/09/20/Revisi-Uu-Watimpres-Resmi-Jadi-UU-Rekam-Jejak-Hukum-Anggota-Watimpres-Harus-Bersih/>

Erik Purnama Putra, "Baleg Setujui Revisi RUU Wantimpres Dibawa ke Paripurna sebagai RUU Inisiatif DPR", <https://emedia.dpr.go.id/2024/07/10/baleg-setujui-revisi-ruu-watimpres-dibawa-ke-paripurna-sebagai-ruu-inisiatif-dpr/>, Diakses 1 Juli 2025.

European Law Institute. *Conseil D'etat*. www.Europeanlawinstitute.eu.Translate.org.

Executive Order No. 168, January 16, 2003, Reconstituting and Revitalizing the Council of State, https://lawphil.net/executive/execord/eo2003/eo_168_2003.html, Diakses 27 Juni 2024.

Executive Order No. 305 September 9, 1987, Creating the Council of State, https://lawphil.net/executive/execord/eo1987/eo_305_1987.html, Diakses 27 Juni 2024.

Iqbal Basyari, "Wantimpres "Naik Kelas" Jadi Lembaga Negara, Jumlah Anggotanya Pun Tak Dibatasi", <https://www.kompas.id/artikel/wantimpres-naik-kelas-jadi-lembaga-negara-jumlah-anggotanya-tak-dibatasi>, Diakses 02 Juli 2025

J.Prasongko, "Akai-Akalan Merombak Dewan Pertimbangan Presiden", <https://www.tempo.co/kolom/revisi-uu-dewan-pertimbangan-presiden-388007>, Diakses 29 Juni 2025.

- Kiki Safitri dan Fitria Chusna Farisa, “Jumlah Wantimpres Tak Lagi Dibatasi, Jimly: Yang Penting Berkualitas”, <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/21/10205331/jumlah-wantimpres-tak-lagi-dibatasi-jimly-yang-penting-berkualitas>, Diakses 29 Juni 2025.
- Muhammad Yasin, ”Wantimpres Perlu Diperkuat, Mengapa?”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/wantimpres-perlu-diperkuat--mengapa-lt66a4ea378684c/>, 2024, Diakses 28 Juni 2025.
- Parlementaria, “Paripurna DPR Setujui Delapan Poin Perubahan dalam Revisi RUU Wantimpres”. <https://emedia.dpr.go.id/2024/09/20/paripurna-dpr-setujui-delapan-poin-perubahan-dalam-revisi-ruu-wantimpres/>, Diakses 02 Juli 2025.
- President's Intelligence Advisory Board (PIAB), <https://www.whitehouse.gov/administration/>, Diakses 29 Mei 2025.
- Supreme Court E-Library of Philippine, Executive Order No. 5, July 12, 1946, <https://elibrary.judiciary.gov.ph/thebookshelf/showdocs/11/34662>, Diakses 18 Mei 2025.
- Tatang Guritno dan Ardito Ramadhan, “Mensesneg Bentuk Satuan Kerja Wantimpres”, <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/13/13134311/mensesneg-bentuk-satuan-kerja-wantimpres>, Diakses 02 Juli 2025.
- The Constitution of the United States, America’s Founding Documents, <https://www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcript>.
- The Philippine Government, <https://oslope.dfa.gov.ph/philippine-government/>, Diakses 19 Mei 2025.
- The President's Council on Jobs and Competitiveness (Jobs Council), <https://www.whitehouse.gov/administration/>.